

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN
KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU**

Steven Arba

NPP. 29.0292

Asdaf Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: Stevenacil4@gmail.com

ABSTRACT

Problem statement/background (GAP): forest and land fire disasters that often occur every year, therefore this study was conducted aiming to find out how the implementation of government policies in handling forest and land fire disasters and to find out what obstacles and efforts were made by the Agency Pekanbaru City Regional Disaster Management. **Objective:** To determine the implementation of government policies in handling forest and land fires in Pekanbaru City, Riau Province. To find out the obstacles faced by local governments in tackling forest fires in Pekanbaru City. **Methods:** the research used is a qualitative research method with a descriptive approach. The process of data collection was carried out through interviews, observation and documentation studies. The data analysis process was carried out by using concept triangulation techniques and data source triangulation. The informants in this study were employees of the Pekanbaru City Regional Disaster Management Agency who handled disaster problems and the people of Pekanbaru City, especially those who lived in areas prone to forest and land fires. **Research results:** from this thesis, namely the implementation of government policies in overcoming forest fires and land funds by the Regional Disaster Management Agency of Pekanbaru City can be classified as effective because it can be seen from the results of data obtained regarding the Regional Disaster Management Agency of Pekanbaru City which shows that the Agency can always overcome in tackling disasters, especially forest and land fires. Barriers that come from outside and inside can also be overcome with the efforts made. **Conclusion:** the authors give suggestions, namely for the Pekanbaru City government and the Pekanbaru City Regional Disaster Management Agency so that there is a need for re-improvement and evaluation of the obstacles that hinder the implementation of government policies in tackling disasters as well as re-evaluating the applicable regulations and increasing the budget in disaster management.

Keywords: Policy implementation, Regional Disaster Management Agency, Land forest fires.

ABSTRAK

Permasalahan/latar belakang(GAP): bencana kebakaran hutan dan lahan yang kerap kali terjadi setiap tahunnya oleh sebab itu penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan pemerintah dalam Penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan serta mengetahui apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru tersebut. **Tujuan:** Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menanggulangi kebakaran hutan di Kota Pekanbaru. **Metode:** penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Proses analisa data dilakukan dengan teknik triangulasi konsep dan triangulasi sumber data. Informan yang ada dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru yang menanggulangi masalah kebencanaan dan masyarakat Kota Pekanbaru khususnya yang bertempat tinggal di daerah yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan. **Hasil Penelitian:** dari skripsi ini yaitu implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru dapat digolongkan efektif karena hal tersebut dapat dilihat dari hasil data yang diperoleh mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa Badan tersebut selalu dapat mengatasi dalam menanggulangi bencana khususnya bencana kebakaran hutan dan lahan. Hambatan yang berasal dari luar maupun dalam juga sudah dapat diatasi dengan upaya yang dilakukan. **Kesimpulan:** penulis memberikan saran yaitu untuk pemerintah Kota Pekanbaru dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru agar perlu adanya perbaikan kembali dan evaluasi terhadap kendala yang menjadi penghambat Implementasi kebijakan pemerintah dalam menanggulangi bencana serta evaluasi lagi peraturan yang berlaku dan penambahan anggaran dalam penanggulangan bencana.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kebakaran hutan lahan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Provinsi Riau sendiri sering terjadi bencana alam kebakaran hutan dan lahan yang ditimbulkan karena ulah manusia dengan kepentingan pribadi ataupun kelompok, salah satu contoh kasus pada tahun 2018 yaitu Polda Riau sudah menetapkan 4 (empat) orang menjadi tersangka kasus Karhutla. Adapun tersangka tersebut membuka lahan untuk perkebunan dan perladangan dengan cara dibakar).

Membuka lahan dengan membakar hutan adalah perkara yang secara jelas dilarang oleh undang-undang, seperti terdapat didalam Pasal 22 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) Namun, ketentuan ini dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan pembukaan lahan tersebut dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Kearifan lokal yang dimaksud yaitu melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Ini artinya, membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Ancaman pidana bagi yang melakukan

pelanggaran terhadap larangan di atas adalah penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar).

Masyarakat yang sering membuka lahan dengan cara dibakar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengambil langkah dengan memberikan dua belas unit alat berat yang dapat dimanfaatkan oleh penghuni secara gratis untuk membuka lahan milik warga. Peminjaman alat berat disediakan secara percuma atau gratis. Karena ini adalah program dari Gubernur Riau untuk masyarakat Riau, maka program pemberian perlengkapan secara cuma-cuma ini juga merupakan langkah penting bagi Pemerintah Provinsi Riau didalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pasca penetapan status darurat karhutla. Diharapkan dengan program ini tidak ada lagi pihak yang membakar hutan untuk pembukaan lahan).

Dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap penduduk Riau dan provinsi sekitarnya, serta negara tetangga, seperti kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan manusia, khususnya di Provinsi Riau. Efek lainnya ialah penerbangan dari dan ke Provinsi Riau menjadi terganggu. Kebakaran hutan juga telah menimbulkan banyak kerugian, terutama kepada kesehatan masyarakat, terkhusus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), baik di Indonesia maupun di negara tetangga, sehingga menuai protes dari negara tetangga contohnya Malaysia dan Singapura sebab menghasilkan asap yang berlangsung hampir setiap tahun.

Kebakaran hutan di Riau bukanlah cerita baru tetapi sudah menjadi kejadian umum di provinsi ini dari tahun 1988 hingga 2020. Efek kebakaran hutan mengakibatkan kerugian untuk manusia, baik ekonomi, sosial, serta kesehatan. Selanjutnya, dalam situasi kebakaran hutan di Provinsi Riau apalagi di seluruh Indonesia, penegakan hukum belum efektif, serta belum sepenuhnya dilaksanakan pemerintah, khususnya di Riau.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Bencana Daerah (BPBD) mengalami beberapa kendala seperti masih kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Namun meskipun kekurangan sarana dan prasarana BPBD Kota Pekanbaru tetap siap siaga untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan).

Penanggulangan kebakaran hutan seringkali melalui upaya mulai dari tingkat nasional hingga tingkat unit pengelolaan hutan dalam masalah pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran.

Upaya pencegahan kebakaran dilangsungkan dengan operasi kesadaran publik, peningkatan teknologi pencegahan, dan penguatan perangkat lunak. Upaya pemadaman kebakaran hutan dilangsungkan dengan meningkatkan teknologi pemadaman, operasi pemadaman (pemadaman dini dan pemadaman lanjut), dan penyelamatan serta evakuasi. Sementara itu, upaya penanganan pasca kebakaran dijalankan dengan pemantauan, penilaian, dan inventarisasi hutan sisa kebakaran, sosialisasi, penegakan hukum, serta rehabilitasi.

Upaya-upaya tersebut dilakukan pemerintah disertai dengan pemberdayaan masyarakat di daerah rawan kebakaran hutan. Masyarakat inilah yang berhadapan langsung apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Karena penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sangat penting, Kementerian Kehutanan membuat kebijakan untuk mengikutsertakan masyarakat didalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan membentuk kelompok berbasis masyarakat, misalnya Masyarakat Peduli Api dan Kelompok Peduli Api lewat Peraturan Menteri Kehutanan No. 12/Menhut-II/2009 mengenai Pengendalian Kebakaran Hutan).

Kendala yang dijumpai pemerintah daerah didalam menanggulangi kebakaran hutan di Kota Pekanbaru yaitu keterbatasan alat. Minimnya alat pemadam yang sesuai dengan kondisi lahan gambut, serta kebiasaan masyarakat membuka lahan dengancara membakar, membuat kebakaran hutan dan lahan gambut sulit dipadamkan.

Berdasarkan dari uraian permasalahan yang telah dijelaskan peneliti di dalam latar belakang ini maka peneliti tertarik untuk mengambil judul, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU”.

1.3. Penelitian Terdahulu

Dalam jurnal hasil Abdul Piqram, (2020)

“Analisis Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kalimantan Barat Terhadap Kualitas Udara Di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak”, Tri Anggraini, Dimas Agustian, 2020. “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Musi Banyuasin”, dan Penelitian oleh Najmi Laila dan Zikri Alhadi “Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Sarolangun”. Dari ketiga penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan yaitu - Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Musi Banyuasin sedangkan penulis di Kota Pekanbaru

Sosialisasi pencegahan Karhutla yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin hanya melalui dengan cara metode turun langsung terhadap masyarakat sedangkan pemerintah Provinsi Riau yang juga mengandalkan media cetak dan elektronik

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

a. Abdul Piqram, “Analisis Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Terhadap Kualitas Udara di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak (2020): Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang”.

Dalam skripsi tersebut, Hasil penelitian ini membuktikan di tahun 2019 ditemukan 1895 titik hotspot yang terpantau di Kalimantan Barat, dengan Kota Pontianak memiliki hotspot sangat sedikit yakni 12 titik pada tahun 2019. Nilai ISPU pada September menjadi yang paling tinggi di Kecamatan Pontianak Tenggara yakni 1802. Dampak dari kebakaran hutan dan menurunnya kualitas udara di Kecamatan Pontianak Tenggara adalah meningkatnya jumlah penderita ISPA, yaitu 118 kasus ISPA tercatat di Kecamatan Pontianak Tenggara. Kesimpulan dari penelitian ini ialah sebaran hotspot di Kalimantan Barat tahun 2019 mencapai 1895 titik. Pada bulan September, Kota Pontianak ditemukan memiliki 12 titik dengan nilai ISPU tertinggi di Kecamatan Pontianak Tenggara yakni 1802. Menurut analisis data hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi terkait dengan upaya yang mesti dilakukan untuk mengurangi sebaran hotspot yang ada, Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kelas I Pontianak mengemukakan: “...Upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah hotspot yang ada yaitu dengan tidak melakukan pembakaran hutan dalam pembukaan lahan, serta pembinaan kepada masyarakat agar lebih peduli dan tanggap serta kebijakan yang tegas dan pembinaan kepada masyarakat oleh pemerintah ...” (Sumber : Kepala Seksi Data dan Informasi).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penerapan kebijakan tentang dilarang membuka lahan dengan cara dibakar.

Adapun perbedaan dari penelitian ini dan penelitian saya adalah perbedaan lokasi penelitian yaitu pada penelitian ini terdapat pada Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sedangkan penelitian yang akan saya lakukan menggunakan lokasi di Provinsi Riau. Selain itu, pada penelitian ini dampak yang disebabkan kebakaran hutan sekedar berupa banyaknya masyarakat yang terkena penyakit ISPA, sementara di Provinsi Riau banyak sekali dampak yang diakibatkan oleh kebakaran hutan seperti pada bidang Lingkungan, Ekonomi, Pendidikan, Ekonomi serta Transportasi.

b. Tri Anggraini, Dimas Agustian, Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Musi Banyuasin (2021): Jurnal Kebijakan Pemerintahan.

Dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, BPBD Kabupaten Musi Banyuasin meyakini bahwasanya pemahaman dan transformasi pengetahuan kepada masyarakat luas terkait pencegahan bencana Karhutla penting sekali untuk kesuksesan upaya pencegahan bencana Karhutla.

Perusahaan Masyarakat mempunyai banyak potensi untuk memicu kebakaran hutan alam, sejalan perkembangan zaman Perubahan penggunaan lahan anthropogenic menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari pemicu kebakaran hutan, sedangkan sebelumnya kebakaran hutan disebabkan oleh faktor alam seperti petir. (Cattau, M.E., Harrison, M.E., Shinyo, I., Tungau, S., Uriarte, M., & DeFries, 2016). Bukan hanya sosialisasi secara mandiri langsung kepada masyarakat, Sosialisasi pencegahan Karhutlah juga dilakukan dengan banyak cara, dimulai dengan membagikan Maklumat Kapolda mengenai bahaya dan sanksi Karhutla dan pemasangan baliho imbauan.

Dalam upaya pencegahan bencana karhutla ini harus bisa merubah mindset masyarakat tentang bahaya dan perlunya pelestarian lingkungan, Sosialisasi ini menekankan pula bagaimana masyarakat mempunyai pemahaman dasar pencegahan munculnya titik api. Lebih jauh, upaya sosialisasi pada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa orang yang dengan sengaja membakar lahan dan hutan menghadapi konsekuensi hukum yang berat).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan menghadapi kebakaran hutan dan lahan.

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian saya yaitu perbedaan dalam memberikan Sosialisasi pencegahan Karhutlah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin hanya melalui dengan cara metode turun langsung terhadap masyarakat sedangkan pemerintah Provinsi Riau yang juga mengandalkan media cetak dan elektronik.

c. Najmi Laila dan Zikri Alhadi, Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Sarolangun: Universitas Negeri Padang.

Dalam jurnal tersebut, BPBD Kabupaten Sarolangun membuat dan menetapkan rencana ataupun program untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla di Kabupaten Sarolangun, akan tetapi program tersebut masih belum berjalan dengan baik, programnya berupa monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan penilaian terhadap operasi pemadaman karhutla, dilakukannya monitoring tersebut untuk melihat titik hotspot yang terekam pada tahun tersebut, kemudian adanya dampak yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), selanjutnya seperti apa respon yang dilakukan dari tingkat daerah sampai nasional. Kemudian evaluasi dilakukan untuk menyesuaikan rencana dengan penerapan di lapangan dan pembelajaran yang bisa diambil dari kejadian kebakaran hutan pada tahun itu.

1.5. Tujuan.

Berdasarkan dari uraian permasalahan yang telah peneliti jelaskan, maka peneliti melaksanakan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau
- b) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menanggulangi kebakaran hutan di Kota Pekanbaru

II. METODE

Para Dosen sekalian untuk menjawab rumusan masalah saya menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Merile S. Grindle (1980) ;

1.Kebijakan

- kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
- jenis manfaat yang dihasilkan
- derajat perubahan yang akan di inginkan
- kedudukan pembuatan kebijakan
- siapa pelaksana program
- sumber daya dikerahkan

2.Lingkungan implementasi

- kekuasaan
- karakteristik lembaga dan penguasa
- Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana terhadap kebijakan.. Yaitu kajian terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

Sebagai gambaran langkah teknis apa saja yang saya gunakan peneliti dilapangan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditopang dengan alat analisis teori parsons at.al maka saya menetapkan desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. kualitatif deskriptif adalah suatu metode dimana peneliti langsung menanyakan langsung kepada narasumber yang terlibat. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji topik penelitian tertentu dan bersifat khusus kemudian diperoleh pengetahuan yang lebih luas. Sehingga pengetahuan itu dapat berlaku pada lokus yang lebih besar.

Setelah desain penelitian ditetapkan maka saya akan mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi.Setelah data dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahapan utama nalisis kualitatif dari 3 tahapan. Yaitu data reduction, data display, conclusion drawing verification. Data reduksi adalah memilih dan memilah data sesuai dengan dimensi teori pemberdayaan parsons at al, data display kegiatan menyajikan data yang telah direduksi kedalam gambar, tabel, dan lain-lain yang mudah dimengerti, yang terakhir conclusion drawing yaitu membuat kesimpulan sementara dari data yang sudah disajikan kemudian diverifikasi kepada narasumber kemudian diperoleh kesimpulan akhir.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Pekanbaru

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kota Pekanbaru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran hutan dan lahan di Kota Pekanbaru yang berpedoman pada dimensi dari teori Implementasi Merile S. Grindle dan diukur dengan indikator dimensi tersebut. Dimensi dari teori implementasi yang penulis gunakan antara lain yang pertama yaitu dimensi kebijakan dengan Indikator: kepentingan yang

terpengaruh oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang akan di inginkan, kedudukan pembuatan kebijakan, siapa pelaksana program, sumber daya dikerahkan. Dimensi yang kedua yaitu Lingkungan implementasi dengan indikator: kekuasaan, karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan serta daya tanggap pelaksana terhadap kebijakan.

3.2 Hambatan yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan di Kota Pekanbaru

Dalam prosesnya masyarakat yang menjadi aktor dan penentu pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Pekanbaru belum sadar akan dampak dari yang mereka lakukan. Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPBD memberikan peluang kepada masyarakat untuk sadar dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya yaitu sulitnya akses kendaraan pemadam kebakaran untuk menjangkau wilayah dalam hutan yang mengalami kebakaran, sehingga membutuhkan jalur udara agar kebakaran yang berada ditengah hutan yang tidak dapat diakses oleh jalur darat dapat dipadamkan, maka dari itu pihak BPBD bekerja sama dengan BNPB dan SAR dalam peningkatan sarana dan prasarana skala besar dalam penanggulangan kebakaran hutan yang tidak bisa dijangkau oleh jalur darat.

Kondisi geografis Kota Pekanbaru adalah beriklim panas dimana menjadi faktor utama mudahnya terjadi kebakaran hutan, sebagai contoh ketika terjadi kebakaran hutan yang awal mulanya kecil dikarena cuaca yang panas dan faktor angin membuat api sangat mudah menyebar dengan cepat, selain itu kondisi lahan yang ada di Provinsi Riau adalah lahan gambut.

Salah satu faktor tertinggi yang menyebabkan kebakaran hutan adalah masih banyaknya pelaku pembakaran hutan dikarenakan penegakkan hukum yang belum maksimal dan kurangnya pengawasan terhadap wilayah hutan. Selama ini di Provinsi Riau pelaku pembakar hutan masih belum jera dikarenakan sulitnya dalam proses penangkapan.

3.3 Upaya dalam mengatasi hambatan

Seluruh pihak yang terkait dapat mendorong aparat penegak hukum untuk melaksanakan wewenang yang dimiliki agar dapat menindak dengan tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan. Selain itu dapat membantu dalam antisipasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. dan masyarakat agar nantinya dapat terlihat seberapa efektif pelaksanaan implementasi kebijakan oleh BPBD dan seberapa banyak masyarakat yang dapat lebih sadar pentingnya pencegahan bencana kebakaran hutan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dinas Lingkungan Hidup menerapkan program pencegahan dan mitigasi terhadap bencana hal ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanganan karhutla, dengan tujuan untuk menghindari dan mencegah bencana dan menurunkan efek yang diakibatkan oleh bencana.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Pemerintah sudah melakukan himbauan kepada masyarakat bahwasanya dilarang membakar lahan dengan sengaja, jika masih terdapat masyarakat yang membuka lahan dengan sengaja membakar maka akan diserahkan ke pihak yang berwajib untuk menindak lanjuti kasus ini, karena dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat lainnya, dan dampaknya ini bisa membahayakan orang lain).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan menghadapi kebakaran hutan dan lahan yaitu dengan cara sosialisasi dan juga melakukan himbauan kepada masyarakat, kemudian memberikan peringatan bahwa tidak dibenarkan membakar hutan dan lahan untuk kepentingan pribadi.

IV. KESIMPULAN

Setelah penulis menganalisis tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan teoritis yang penulis gunakan, yakni teori Merile S Grindle (1980) dengan dimensi isi kebijakan dan lingkungan implementasi untuk menjawab rumusan masalah maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Pekanbaru:

a. Proses implementasi kebijakan dilakukan melalui pelaksanaan oleh BPBD yang ada di Kota Pekanbaru yang meliputi tahapan pelaksanaan

hasil implementasi kebijakan yang pemerintah hasilkan berupa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Terdapat Pencegahan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Sarana Prasarana, Pengawasan, Kelembagaan, Peran masyarakat, Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan; dan Ketentuan Pidana untuk penanggulangan dan pencegahan.

b. Pelaksana dari peraturan daerah tersebut yaitu BPBD, Tni/Polri, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan. Partisipasi masyarakat terjadi dengan diberikannya penyadaran penyadaran serta pelatihan pelatihan kepada masyarakat kelurahan tangguh bencana dalam penanggulangan kebakaran hutan. Sosialisasi dan pelatihan telah diberikan yang harapannya setelah mendapatkan sosialisasi hasilnya dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kota Pekanbaru.

2. Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru:

a. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh BPBD belum dapat melaksanakan kegiatan dengan optimal karena kurangnya anggaran untuk memaksimalkan pelaksanaan implementasi kebijakan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kurangnya sarana dan prasarana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru dalam penanggulangan bencana adalah dengan cara berkoordinasi dengan pihak terkait seperti dinas pemadam kebakaran, BNPB, Tni/Polri. Dinas pemadam kebakaran memberikan bantuan berupa pinjam pakai MPK (Mobil Pemadam Kebakaran). Dan pihak terkait lainnya yang dapat memberikan bantuan tenaga.

b. Dalam prosesnya masyarakat yang menjadi aktor dan penentu pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Pekanbaru belum sadar akan dampak dari yang mereka lakukan. Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPBD memberikan peluang kepada masyarakat untuk sadar dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Pekanbaru.

Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar BPBD Kota Pekanbaru, agar tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk memenuhi kekurangan sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kota Pekanbaru dan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi tindakan preventif atau pencegahan meluasnya hutan ataupun lahan yang terbakar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada BPPBD Kota Pekanbaru dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

V. DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Abdul, P. "Analisis Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kalimantan Barat Terhadap Kualitas Udara Di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak". Universitas Negeri Semarang, 2020.

Anggraini, T, and D Agustian. "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Musi Banyuasin." *jurnal kebijakan pemerintah* 2(8) (2021).

Grindle, M.S. *Politics and Policy Implementations in the Third World*. New Jersey: Princetown University Press, 1980.

Laila, N, and Z Alhadi. "Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan(Karhutla) Di Kabupaten Sarolangun." *jurnal kehutanan* 3(3) (2020).